



Media: Seputar Indonesia

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Juni 2012

Halaman: 1

Yogya Kota Ramah Bisnis

JAKARTA -Yogyakarta-menduduki peringkat pertama sebagai kota termudah dalam hal mengurus usaha. Bahkan secara global, Kota Pelajar ini menduduki peringkat keempat dari 183 kota di dunia. Peringkat ini merupakan hasil survei yang dilakukan International Finance Corporation (IFC) tentang reformasi birokrasi 2012. Indikator yang digunakan adalah kemudahan memulai usaha, mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), dan pendaftaran properti.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan, Yogyakarta hanya memiliki tujuh prosedur dalam hal perizinan usaha.

Yogya Kota Ramah Bisnis

((dari Hal 1

"Di kota lain tidak seperti itu. Biasanya ada yang memiliki sembilan sampai 11 prosedur dan memakan waktu berbulan-bulan," kata Robert Endi Jaweng saat memaparkan hasil survei reformasi birokrasi di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, kemarin.

Untuk nasional, secara umum Yogyakarta menyingsingkan 20 kota besar lainnya di Indonesia. "Secara umum Yogyakarta paling atas dalam hal memangkas perizinan berusaha. Meski ada Kota Medan, dari segi biaya Kota Medan memerlukan dana besar ketimbang Yogya dalam hal perizinan," jelasnya.

Menurut Robert, kemudahan dalam berusaha sangat tergantung pada komitmen tiap kepala daerah dalam melakukan efisiensi pengurusan izin usaha. "Banyak hal yang dapat kami simpulkan, ada daerah yang juga memiliki tujuh prosedur perizinan usaha, tapi memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar," tuturnya.

Pemerintahan daerah yang menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dinilai paling efektif memudahkan izin berusaha. Meski begitu, hanya sedikit daerah yang menerapkan sistem ini. "Di Makassar, Batam, Jambi, dan Mataram misalnya, PTSP sulit berfungsi efektif karena kewenangannya hanya berada pada level administratif. Sementara fungsi kebijakan ada pada level dinas sektoral," jelasnya.

Pengurusan IMB masih memerlukan gugatan tangan dari kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan. "Ini seharusnya sudah harus satu pintu, artinya semua kebijakan teknis sudah berada pada sistem PTSP Perizinan," ucapnya.

Untuk pengurusan izin usaha di Indonesia, para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tidak kurang dari Rp1 juta. "Paling sedikit bagi yang menerapkan PTSP hanya bisa mengeluarkan dana Rp381.000," paparnya.

Sementara dalam survei itu, Jakarta menempati peringkat teratas dalam hal pendaftaran properti berupa pengurusan bea balik nama tempat usaha. Di Ibu Kota, pengurusan bea balik nama tempat usaha hanya membutuhkan biaya sekitar 10% dari total nilai properti. "Kota lain rata-rata 20% nilai properti untuk mengurus bea balik nama tempat usaha," jelasnya.

Adapun Banda Aceh memang predikat sebagai kota paling singkat mengurus IMB dengan total 42 hari. Rata-rata secara nasional, untuk mengurus IMB perlu waktu 75 hari. Untuk kategori pendaftaran properti, Manado menempati peringkat pertama, yaitu hanya 12 hari, sementara rata-rata nasional 33 hari. "Tapi dari segi biaya, Kota Manado masih tinggi," jelasnya lagi.

Asisten Deputi Pelayanan Perencanaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Endi Fatonny mengatakan, pihaknya secara intensif terus menyosialisasikan pentingnya pelayanan satu pintu. "Kami akui masih ada daerah yang belum menerapkan sistem ini. Ada juga yang menerapkannya, tapi masih setengah-setengah, misalnya dalam hal kebijakan teknis masih harus berkoordinasi dengan dinas terkait. Tapi kami terus mendorong upaya ke arah sana," ungkapnya.

Sebelumnya pada periode 2010/2011, secara global Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal kemudahan berusaha. Indonesia berada di urutan ke-129 dunia, tertinggal jauh dari enam negara di Asia Timur dan Pasifik, yakni Singapura, Hong Kong, Korea, Thailand, Malaysia, dan Jepang. Negara-negara tersebut termasuk 30 besar di dunia dalam hal kemudahan berusaha.

"Namun, saat ini Indonesia secara global terus menunjukkan kualitasnya dalam hal kemudahan berusaha, terutama pemerintah daerah yang secara bertahap melakukan reformasi birokrasi," kata Operation Officer Investment Climate IFC Sandra Pranoto.

● ichsan amin

Dihaturkan Kepada Yth. :
1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Dinas Perizinan</u>	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☒ Positif	☐ Segera
3.	☐ Netral	☒ Biasa
4.		☒ Untuk diketahui
5.		

Yogyakarta,
Kepala
Ttd.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005